



## KEADAAN SOSIAL EKONOMI PASCA KEMERDEKAAN INDONESIA

Oleh : Zulkarnain dan Anisa Onifah

### A. Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Sejarah bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sangat buruk, bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk, dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut. Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflasi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang.<sup>1</sup>

Masalah-masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia setelah pendudukan Jepang dan revolusi sangatlah besar. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, keadaan ekonomi sangat kacau. Adapun penyebab dari keadaan ekonomi yang amat buruk itu antara lain :

#### Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi (keuangan) Indonesia pada masa awal kemerdekaan amat buruk. Penyebabnya antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
- b. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Pada saat kesulitan ekonomi menghimpit bangsa Indonesia, Panglima AFNEI yang baru, Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang diduduki Sekutu. Uang NICA ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun. Pemerintah melalui Perdana Menteri Syahrir memproses tindakan tersebut. Karena hal itu berarti pihak Sekutu telah melanggar persetujuan yang telah disepakati, yakni selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan ada mata uang baru. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. (Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.)

---

<sup>1</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta : hal. 475.



- c. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
- d. Kas negara kosong.
- e. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

## **B. Blokade Belanda Terhadap RI**

Hiper inflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali.<sup>2</sup> Pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas Negara dan bea cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak.kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah.<sup>3</sup> untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam mata uang yaitu mata uang *de Javanese Bank*, mata uang Pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Sebagai akibat dari adanya inflasi, yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Selain itu adanya blokade Belanda yang menutup pintu keluar masuk perdagangan RI yang mengakibatkan barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor. Adapun alasan Belanda melakukan blokade adalah :

1. Untuk mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia
2. Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik Asing lainnya.
3. Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Akibat dari adanya blokade tersebut diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Juga adanya inflasi yang tak terkendalikan diharapkan akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan sosial, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Dan memang perbendaharaan kosong, sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar. Pihak Belanda memperhitungkan bahwa RI secara ekonomi akan segera ambruk.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Marwati Djoened, Poesponegoro Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, 1993, hal. 172

<sup>3</sup> Soemitro Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoeangan*, Djakarta, 1947, hal. 27

<sup>4</sup> Ibid, hal. 174



### C. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menembus blokade ekonomi :

1. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India seberat 500000 ton, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3. Konferensi ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947. Badan perancang ini merupakan badan yang tetap yang tugasnya untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
5. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948 yaitu mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
6. Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk *Planing Board* (badan perancang ekonomi yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun). Kemudian IJ Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama *Plan Kasimo* yang isinya antara lain :
  - a. Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
  - b. Pencegahan penyembelihan hewan pertanian
  - c. Penanaman kembali tanah kosong
  - d. Pindahan penduduk (transmigrasi).<sup>5</sup>

### D. Keadaan Sosial Masyarakat Pasca Kemerdekaan

Pasca Proklamasi kemerdekaan banyak terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan diproklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat. Yang mana masyarakat di Indonesia sebelum kemerdekaan didominasi oleh warga eropa dan Jepang, sehingga warga pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa.

Banyak perkebunan dan instalasi-instalasi industri di seluruh penjuru negeri rusak berat. Dan yang paling penting adalah meningkatnya jumlah penduduk yang sangat tajam. Produksi pangan terutama beras menurun, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan para penduduk. Maka sejumlah impor beras masih sangat dibutuhkan. Bidang pertanian semakin banyak menyerap tenaga kerja baru dengan membagi pekerjaan kepada sejumlah buruh yang jumlahnya semakin meningkat.

Dengan menurunnya lahan petani, maka banyak para petani yang tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka hanya mengandalkan menjadi buruh saja untuk mencukupi kehidupannya. Banyak

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 182



pula para tenaga buruh yang ada kemudian merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>6</sup>

**Referensi :**

Marwati Djoened, Poesponegoro Nugroho. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta :

M. C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta.

Soemitro Djojohadikoesoemo. 1947. *Beberapa Soal Keoeangan*. Djakarta

---

<sup>6</sup> Ricklef. Op. cit. hlm. 472